



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



LAPORAN KINERJA (LKj) PERUBAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas berkat dan rahmat Allah SWT., *Laporan Kinerja (LKj) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026* dapat disusun dan diterbitkan. Dengan berakhirnya TA. 2025 yang merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra 2025-2029, maka terdapat penyesuaian yang diakomodir dalam penyusunan Laporan Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026. Laporan Kinerja Perubahan ini disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang mengacu pada Renstra 2025-2029 yang digunakan selama masa transisi. Selain itu, diharapkan Laporan Kinerja ini menjawab Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 yang disusun pada saat penetapan Renstra periode 2025-2029.

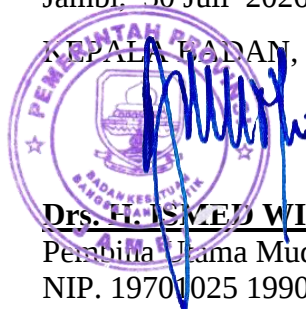
Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik telah di susun dokumen rencana Strategis dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan visi dan misi Gubernur Jambi, “TERWUJUDNYA JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT” dengan mengemban tugas pada Misi Pertama “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah di daerah dibidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, Penanganan konflik, Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Jambi, 30 Juli 2026

KEPALA BADAN,



Drs. H. ISVED WIJAYA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701025 199003 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang di jabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, pada tahun 2026, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diukur melalui 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang terdapat di dalam Renstra OPD, yang mengacu pada Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2026. Tujuan dan sasaran strategis tersebut telah dicapai dengan sangat baik. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2026 berdasarkan Sasaran Strategis yang akan dicapai.

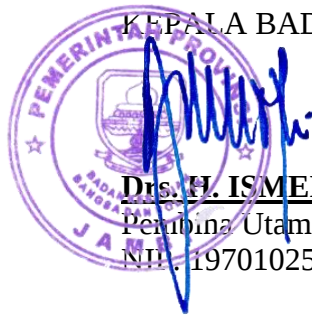
Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada tahun 2026 menunjukkan persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis sesuai dengan Renstra 2025-2029 dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada tahun 2026 dapat dinilai ***“berhasil”***. Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sangat terjaga konsistensinya dan menunjukkan peningkatan yang semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasari oleh evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, yang hasilnya ditindaklanjuti dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal.

Hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2026 dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif

bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang selanjutnya untuk mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Jambi, 30 Juli 2026

KEPALA BADAN,



Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701025 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	3
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Sumber Daya Aparatur.....	14
1.5 Sarana dan Prasarana	17
1.6 Keuangan	30
1.7 Sistematisasi Penyusunan LKj Tahun 2025	30
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis	30
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	30
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	32
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	32
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	31
3.3 Realisasi Anggaran	33
3.4 Laporan Hasil Kegiatan dan Realisasi Kegiatan T.A. 2025.....	45
 BAB IV PENUTUP	82

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1 Struktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai	17
Gambar.1.3 Golongan Ruang Pegawai	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	16
Tabel 1.2 Golongan Ruang Pegawai	18
Tabel 1.3 Rekapitulasi Barang Inventaris	19
Tabel 1.4 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana	20
Tabel 1.5 Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	20
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	26
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026.....	27
Tabel 2.3 Formulir Perjanjian Kinerja OPD	28
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.3 Capaian Kinerja 2021-2025	32
Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah.....	34
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2025.....	36
Tabel 3.6 Data Organisasi Kemasyarakatan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 yang mencakup informasi capaian kinerja outcome berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal) dan Perjanjian Kinerja 2025 (perubahan) disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
2. Mendorong Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya

terwujud. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah LKj Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, khususnya sebagai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026 sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi, khususnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan sebagai penyajian data realisasi, baik data mengenai target maupun realisasi kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

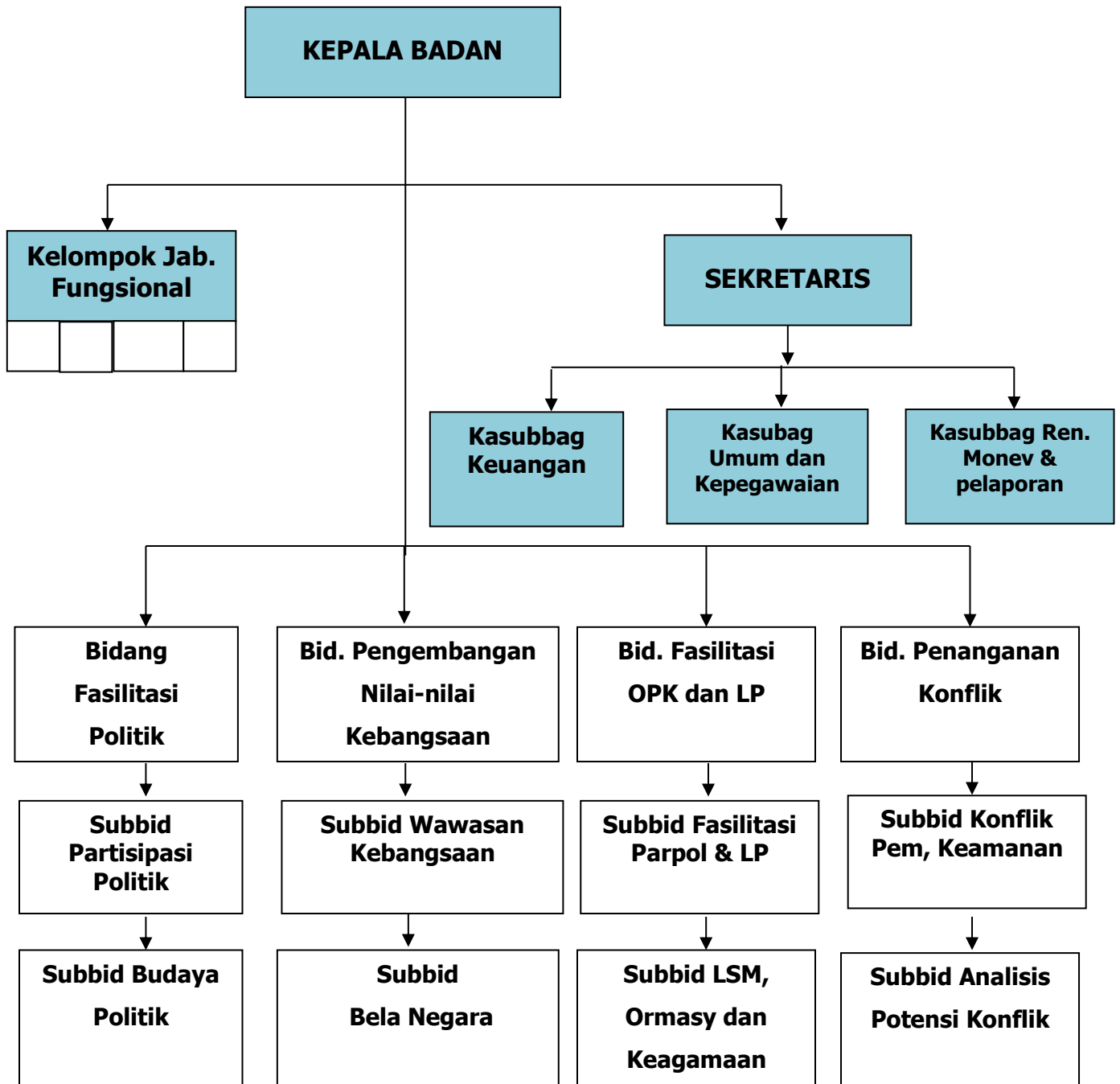
1.1 Struktur Organisasi

Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Yaitu :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Partisipasi Politik.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Bidang Fasilitas Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
- e. Bidang Penanganan Konflik.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi. Untuk dapat melaksanakan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
 - d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan Badan Kesbangpol;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
 - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengsistimasiikan data dan penyusun rencana serta program kerja;
 - b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
 - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
 - d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
 - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
- Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 - Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
 - Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
 - Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
 - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.
 - (1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan kemasyarakatan;
 - c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
 - f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
 - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
 - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;
 - d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
 - e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
 - c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
 - e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
 - c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuhkan kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, dijumpai beberapa permasalahan berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa, Wilayah Provinsi Jambi terdiri dari Masyarakat yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Provinsi Jambi.

Isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya Pendidikan politik Masyarakat terutama pada pemilih pemula;
2. Masih perlunya peningkatan Wawasan Kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam wadah kesatuan bangsa dan politik;
3. Perlunya peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan untuk mendukung Pembangunan daerah;

4. Meningkatnya konflik sosial terutama konflik sengketa lahan di daerah Provinsi Jambi.
5. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat.
6. Meningkatnya aksi penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan antisipasi bahaya aksi terorisme dan radikalisme di daerah Provinsi Jambi.
7. Meingkatkan pengakuan persamaan derajat, kewajiban dan hak azasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial atau warna kulit.
8. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan kearah dalam rangka menekan potensi konflik.
9. Perlunya penelitian pemetaan wilayah potensi konflik.

1.4. Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang. 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 31 (tiga puluh satu) orang tenaga Non ASN, terdiri dari :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Jabatan Kepegawaia	Jumlah	Satuan
1	Pejabat Struktural	15	Orang
2	Staf/Pelaksana	21	Orang
3	Tenaga Non ASN	31	Orang

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi (2025)

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan Struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

**Komposisi Jabatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**

No	Eselon	Jumlah	Satuan
1	Eselon I	-	Orang
2	Eselon II	1	Orang
2	Eselon III	5	Orang
3	Eselon IV	9	Orang
4	Non Eselon	21	Orang

Tabel 1.3

**Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan**

No	2024	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	SD	-	-	-
2	S L T P	-	-	-
3	S L T A	2	Orang	PNS Daerah
4	D.III	2	Orang	PNS Daerah
5	S.1	22	Orang	PNS Daerah
6	S.2	10	Orang	PNS Daerah
7	S.3	-	-	-
	Jumlah	36 Orang		

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2025

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas. 57,8% pegawai sudah berpendidikan sarjana (S1), bahkan 28,9% lulusan Pasca Sarjana (S2) dan 5,2% Diploma, namun sebanyak 7,1% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat

dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

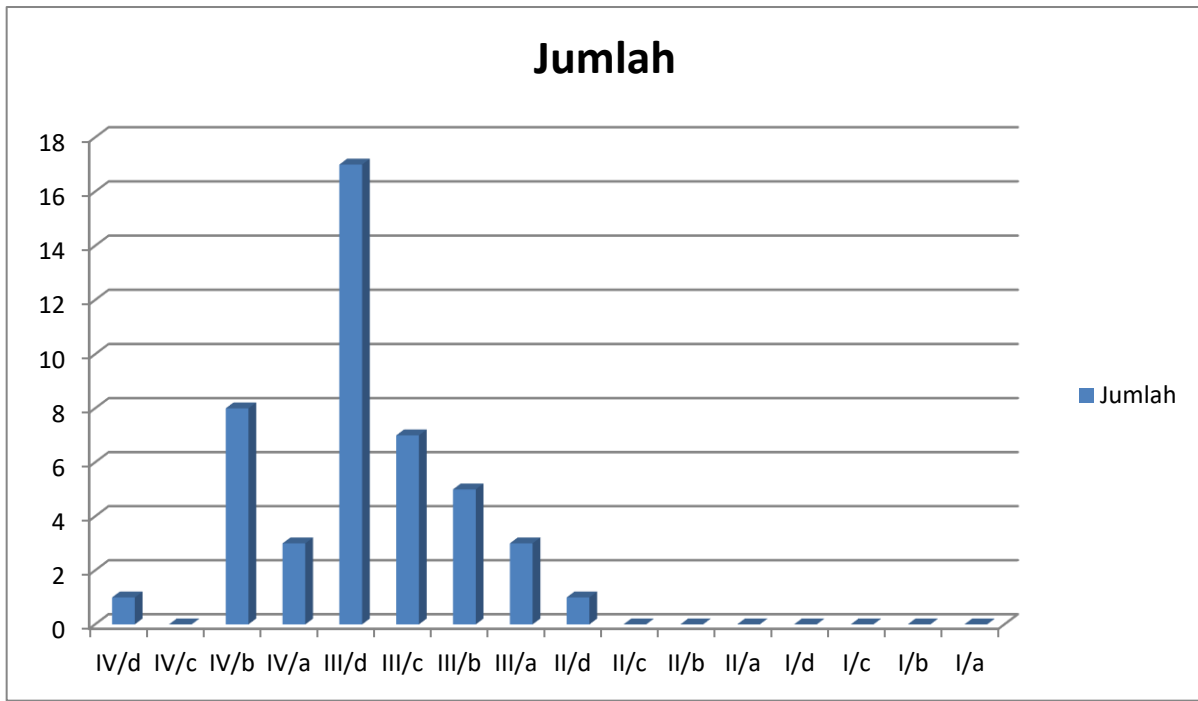
Tabel 1.4
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	I.c	-	-	-
4	I.d	-	-	-
5	II.a	-	-	-
6	II.b	-	-	-
7	II.c	-	-	-
8	II.d	1 Orang		PNS Daerah
9	III.a	2 Orang		PNS Daerah
10	III.b	3 Orang		PNS Daerah
11	III.c	2 Orang		PNS Daerah
12	III.d	18 Orang	-	PNS Daerah
13	IV.a	3 Orang		PNS Daerah
14	IV.b	6 Orang		PNS Daerah
15	IV.c	1 Orang		-
16	IV.d	-		PNS Daerah
17	IV.e	-	-	-
	Jumlah	36 Orang	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2025

Dari data-data diatas dapat dilihat jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sangat jauh dari jumlah yang dibutuhkan, mengingat banyaknya program dan kegiatan yang ada, sehingga kekurangan jumlah pegawai ini dapat memicu ketidakefektifan dalam menjalankan program dan kegiatan.

Gambar 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan Ruang



1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana yang memadai, seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Barang Inventaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(Data Desember 2025)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				B	KB
I	Tanah dan Bangunan	1521	M2		
II	KENDARAAN :				
	1.Roda 2	12	UNIT	12	4
	2.Roda 4	7	UNIT	7	2
III	APK :				
	1.Lemari Kayu	24	BUAH	24	7
	2.Filling Kabinet	15	BUAH	15	3
	3.Papan Tulis	4	BUAH	4	-
	4.Kursi Putar	25	BUAH	25	8
	5.Kursi Biro	35	BUAH	35	-
	9.Meja Biro	42	BUAH	42	4
	10.Meja ½ Biro	55	BUAH	55	17
	11.Televisi	7	UNIT	7	-
	12.Bagan Struktur	1	BUAH	1	-
	13.Komputer (PC)	28	UNIT	28	3
	14.Laptop	24		24	4
	15.AC	64	UNIT	64	6
	16.Infocus	2	UNIT	2	-
	17.Printer	25	UNIT	25	3

Sumber : Data Inventaris Barang Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2025

Tabel 1.6
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pengadaan	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB	2022	
1	AC 2 Pk	19	9	1	2
2	AC 1 Pk	25	11	1	2
3	Filling Kabinet	8	7	-	2
4	Kursi Kantor	23	12	8	17
5	Pc All In One	22	6	2	2
6	Laptop	19	6	2	2
7	Printer G4010	8	3	1	2
8	Printer Epson	9	3	1	2
9	Printer Epson G2010	4	-	4	4

Sumber : Data Inventaris Barang Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2025

Tabel 1.7
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pemeliharaan 2024	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB		
1	Minibus/Motor	12	8	8	8
2	Bangunan/Gedung Kantor	560 m2	356 m2	916 m2	1
3	AC	44	18	62	23
4	PC (Komputer)	22	6	28	14
5	Printer	17	6	23	13

Sumber :
 Data Inventaris

Barang Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan

sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 26.675.183.061,- yang selanjutnya mengalami perubahan tertuang dalam DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar Rp. 21.880.640.033,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Rp. 7.702.770.050,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.875.213.077,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.6.204.029.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.98.627.906,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah).

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung lainnya, yang mana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdapat 6 program dan 12 kegiatan.

1.7 Sistematika Penyusunan LKj Tahun 2025

Sistematika Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun mempedomani Peraturan Menteri PANRB Ri Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas gambaran tentang latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 (awal dan perubahan), penyajian tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Perbedaan antara target kinerja pada renja tahun 2025 dengan perjanjian kinerja tahun 2025 di awal tahun maupun perubahannya.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selama Tahun 2025 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 atas capaian kinerjanya serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi dan misi serta mempertahankan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategik yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran. Program dan Kegiatan disusun secara sistimatis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, inovatif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai di masadepan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya,tetap konsisten dan eksis, antisipasif, inovatif dan produktif untuk menuju cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2025 – 2030 adalah :

Visi :

**“MERWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2029 DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT”**

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2025– 2030 antara lain:

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2025 – 2030 antara lain :

- MISI PERTAMA : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
- MISI KEDUA : Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- MISI KETIGA : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Ketiga misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Pertama** dan kedua Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu : “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**” dan **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**

Dari misi pertama dan ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis e-government melalui penerapan SPBE yang terintegrasi, berintegritas dengan pelayanan publik prima. Untuk mencapai sasaran tersebut serta , **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam menetapkan Program Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi tersebut di atas serta memecahkan permasalahan dalam menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2030, yaitu : "Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang dinamis berdasarrkan Pancasila dan Berwawasan Kebangsaan"

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah
Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Jambi**

Visi : Merwujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah			
Misi 3 : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan	Meningkatnya Kehidupan demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Meningkatkan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap penegakkan demokrasi serta pembinaan Ipoleksosbudkumham

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2030

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan dalam periode 2025-2029.

Strategi

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pengukuran pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan.
- 2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah.
- 3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM
- 3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi, menguatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi dalam tahun berjalan dengan menggunakan metode baru (aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi) serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2025-2029
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan	Meningkatnya penegakkan demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Indeks Aspek Kebebasan	60,88	80,99	81,00	81,50	82,00	83,00	BPS Prov. Jambi
			Indeks Aspek Kesetaraan	92,45	76,50	77,50	78,50	79,00	80,00	
			Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	85,00	82,78	83,50	84,00	85,50	86,00	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,01	80,01	81,50	82,50	83,00	85,00	AKIP
			Indeks Kualitas Pelayanan Publik	85,00	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	IKM

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) sasaran, masing-masing sasaran memiliki Indikator yang akan menjadi titik focus dalam menjalankan program dan kegiatan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (awal)**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kehidupan demokrasi, harmonisasi, social, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif.	Indeks aspek kapasitas Lembaga demokrasi	82,78 %
		Indeks aspek kebebasan	80,99 %
		Indeks aspek kesetaraan	76,50%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	A (80,01)
		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	85 nilai

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi	Rp. 7.193.684.542,-	APBD
2	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.893.639.166,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 6.165.642.644,-	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 653.220.227,-	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 621.399.381,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 809.114.623,-	APBD

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra 2025-2029, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Dapat dijelaskan tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Renja tahun 2026 dengan yang di Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Tahun 2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2026 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kehidupan demokrasi, harmonisasi, social, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif.	- Indeks aspek kapasitas Lembaga demokrasi - Indeks aspek kebebasan - Indeks aspek kesetaraan	82,78 % 80,99 % 76,50%	Dalam Proses Dalam Proses Dalam Proses	- - -	- - -
2.	Meningkatnya pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Predikat akuntabilitas kinerja - Indeks Kualitas Pelayanan Publik	80,01% 85	Dalam Proses Dalam Proses	- -	- -

Sumber : Badan Kesbangpol 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi memiliki indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi . Pada tahun 2025, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai 100%) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2025, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Badan Kesbangpol Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100%. Secara detail capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1 : Meningkatkan situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat

Indikator : Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja 2025-2029

No.	Indikator	Capaian				Capaian 2029		
		2025	2026	2027	2028	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72,00 %	75,00 %	75,50%	76,50%	80,50%	85,00%	100 %
2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	85,60 %	86,00 %	87,00%	87,50%	88,00%	90,00%	100%
3.	Indeks Aspek Kebebasan	80,99 %	80,99 %	81,00%	81,25%	82,00%	83,00%	100 %
4.	Indeks Aspek Kesenjangan	76,50 %	76,50 %	77,25%	77,50%	78,00%	78,50%	100 %
5.	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	82,78 %	82,78 %	83,00%	84,00%	85,00%	90,00%	100%

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang secara operasional didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Sosialisasi Undang-undang Politik.
2. Rapat Internal.
3. Rapat Tim Verifikasi.
4. Rapat Koordinasi Bidang Politik.

Sasaran #2 : Meningkatnya kehidupan demokrasi yang dinamis

- Indikator :
- 1 Indeks Kebebasan Sipil
 - 2 Persentase Ormas Aktif
 - 3 Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi

Sasaran ini dicapai melalui Program-Program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Secara operasional yang menjadi pendukung program-program diatas adalah kegiatan-kegiatan berikut ini :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan.
 - 3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3.3. Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 18.336.700.583,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Juli 2026 pada Badan Kesbangpol dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Rp. 2.950.671.513,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.903.443.201,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp. 5.704.029.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 118.606.059,- (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Realisasi Anggaran secara keseluruhan Rp. 11.676.749.773,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Realisasi (63.68%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pembangunan tahun 2026 telah mencukupi.

Untuk Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dialokasikan untuk membiayai Program/ Kegiatan pada Badan Kesbangpol disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				24.203.400.000		27.251.100.000		30.443.700.000		38.357.800.000		41.481.270.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Publik yang prima		90 %	10.364.900.000	91%	11.607.600.000	92%	11.798.200.000	93%	11.057.800.000	95%	12.236.270.000	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Nilai AKIP	80,01	80,01	10.100.000	81,50	11.100.000	82,50	12.200.000	83,00	13.400.000	85,00	14.700.000	Nilai Indeks Nilai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86		87		88		89		90		
	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik katagori PD	85	85		85.25		85.50		85.75		86		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	390.000.000	100 %	429.500.000	100 %	471.600.000	100 %	520.700.000	100 %	545.400.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	12 dokumen	5 Dok	125.000.000	5 Dok	137.500.000	5 dok	151.200.000	5 dok	166.300.000	5 dok	182.900.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5 laporan	240.000.000	5 lap	264.000.000	5 lap	290.400.000	5 lap	319.400.000	5 lap	322.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5 lap	25.000.000	5 lap	28.000.000	5 lap	30.000.000	5 lap	35.000.000	5 lap	40.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	100 %	8.480.000.000	100 %	8.510.500.000	100 %	8.536.500.000	100 %	8.565.600.000	100 %	8.595.600.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org	50 org	8.000.000.000	50 org	8.000.000.000	55 org	8.000.000.000	60 org	8.000.000.000	65 org	8.000.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	16 dok	230.000.000	16 dok	260.500.000	16 dok	286.500.000	16 dok	315.100.000	16 dok	346.600.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	-	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	

	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100 %	93.000.000	100 %	116.200.000	100 %	127.800.000	100 %	140.500.000	100 %	154.470.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	85 paket	82 paket	51.000.000	82 paket	70.000.000	82 paket	77.000.000	82 paket	84.700.000	82 paket	93.170.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/ pelatihan	14 orang	14 orang	42.000.000	14 orang	46.200.000	14 orang	50.800.000	14 orang	55.800.000	14 orang	61.300.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %	100 %	414.200.000	100 %	455.600.000	100 %	500.100.000	100 %	550.100.000	100 %	600.100.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	41.100.000	1 paket	43.700.000	1 paket	48.000.000	1 paket	52.800.000	1 paket	58.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	63.300.000	1 paket	72.500.000	1 paket	79.700.000	1 paket	87.600.000	1 paket	96.300.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	7.500.000	12 dok	8.200.000	12 dok	9.000.000	12 dok	9.900.000	12 dok	10.800.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	10 lap	75.000.000	10 lap	82.500.000	10 lap	97.700.000	10 lap	100.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 lap	414.200.000	4 lap	455.600.000	4 lap	500.100.000	4 lap	550.100.000	4 lap	600.100.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan BMD	100 %	100 %	178.000.000	100 %	1.230.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	330.000.000	100 %	1.310.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6 Mobil 12 Motor	-	-	1 mobil 2 motor	500.000.000	1 Mobil 2 Motor	500.000.000	-	-	1 mobil 2 mobil	500.000.000	

	Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Opraasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Mobil		-	1 Mobil	450.000.000	1 mobil	450.000.000		-	1 mobil	450.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	22 unit	178.000.000	22 unit	280.000.000	22 unit	300.000.000	22 unit	330.000.000	22 unit	360.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	95 %	95 %	207.500.000	95 %	217.500.000	95 %	222.000.000	95 %	228.000.000	95 %	240.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 lap	20.500.000	1 lap	20.500.000	1 lap	22.000.000	1 lap	23.000.000	1 lap	25.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 lap	133.000.000	4 lap	140.000.000	4 lap	140.000.000	4 lap	140.000.000	4 lap	145.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 lap	54.000.000	4 lap	57.000.000	4 lap	60.000.000	4 lap	65.000.000	4 lap	70.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	592.100.000	100 %	637.200.000	100 %	678.000.000	100 %	710.000.000	100 %	775.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	295.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	310.000.000	20 unit	320.000.000	20 unit	350.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	35 unit	87.100.000	40 unit	87.200.000	45 unit	88.000.000	50 unit	90.000.000	55 unit	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	210.000.000	2 unit	250.000.000	2 unit	280.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	325.000.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	76%	78%	6.055.000.000	79%	7.055.000.000	80%	8.215.000.000	81%	14.120.000.000	82%	15.195.000.000	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI	76%	78%	6.055.000.000	79%	7.055.000.000	80%	8.215.000.000	81%	14.120.000.000	82%	15.195.000.000	

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	5 dokumen	60.000.000	5 dok	60.000.000	5 dok	250.000.000	5 dok	350.000.000	5 dok	375.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 dok	3 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	250.000.000	4 dok	5.000.000.000	4 dok	5.000.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 org	150 org	2.500.000.000	150 org	3.000.000.000	150 org	3.500.000.000	150 org	4.000.000.000	150 org	4.500.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	210 orang	565.000.000	300 orang	565.000.000	330 orang	350.000.000	400 orang	400.000.000	420 orang	420.000.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 lap	6 lap	350.000.000	6 lap	350.000.000	6 lap	365.000.000	6 lap	370.000.000	6 lap	400.000.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	150 org	2.500.000.000	150 org	3.000.000.000	150 org	3.500.000.000	150 org	4.000.000.000	150 org	4.500.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100%	100%	3.215.000.000	100%	3.385.000.000	100%	4.540.000.000	100%	6.500.000.000	100%	6.700.000.000	Persentase

Meningkatnya Etika dan Budaya politik													
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase terlaksana Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	3.215.000.000	100%	3.385.000.000	100%	4.540.000.000	100%	6.500.000.000	100%	6.700.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	6 dok	150.000.000	6 dok	200.000.000	6 dok	250.000.000	6 dok	300.000.000	6 dok	350.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1 dok kebijakan	100.000.000	1 dok kebijakan	150.000.000	1 dok kebijakan	200.000.000	1 dok kebijakan	250.000.000	1 dok kebijakan	300.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	100 org	100 org	2.500.000.000	100 org	2.500.000.000	100 org	3.500.000.000	100 org	5.200.000.000	100 org	5.200.000.000	

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72 org	100 org	315.000.000	100 org	335.000.000	100 org	340.000.000	100 org	400.000.000	100 org	450.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 lap	5 lap	150.000.000	5 lap	200.000.000	5 lap	250.000.000	5 lap	350.000.000	5 lap	400.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya ketertiban Organisasi Masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	90%	92%	1.473.500.000	93%	1.271.000.000	94%	2.065.000.000	95%	2.465.000.000	96%	2.590.000.000	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	91%	92%	1.473.500.000	93%	1.271.000.000	94%	2.065.000.000	95%	2.465.000.000	96%	2.590.000.000	
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 dok	5 dok	207.000.000	5 dok	250.000.000	5 dok	320.000.000	5 dok	380.000.000	5 dok	400.000.000	

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	5 kebijakan	100.000.000	5 kebijakan	150.000.000	5 kebijakan	200.000.000	5 kebijakan	250.000.000	5 kebijakan	300.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 org	60 org	931.500.000	60 org	1.000.000.000	60 org	1.150.000.000	60 org	1.350.000.000	60 org	1.350.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 org	60 org	100.000.000	60 org	150.000.000	60 org	200.000.000	60 org	250.000.000	60 org	300.000.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 lap	5 lap	135.000.000	5 lap	171.000.000	5 lap	195.000.000	5 lap	235.000.000	5 lap	240.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	75%	77%	890.000.000	78%	1.010.000.000	79%	1.130.000.000	80%	1.190.000.000	81%	1.120.000.000	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitas KUB dan penghayat kepercayaan	75%	77%	890.000.000	78%	1.010.000.000	79%	1.130.000.000	80%	1.190.000.000	81%	1.120.000.000	

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	6 dok	6 dok	110.000.000	6 dok	120.000.000	6 dok	150.000.000	6 dok	180.000.000	6 dok	200.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	5 kebijakan	120.000.000	5 kebijakan	170.000.000	5 kebijakan	175.000.000	5 kebijakan	180.000.000	5 kebijakan	20.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 org	50 org	482.000.000	50 org	500.000.000	50 org	540.000.000	50 org	560.000.000	50 org	600.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	55 org	58.000.000	55 org	70.000.000	55 org	90.000.000	55 org	95.000.000	55 org	100.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	-	5 lap	120.000.000	5 lap	150.000.000	5 lap	175.000.000	5 lap	175.000.000	5 lap	200.000.000	

	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	78%	79%	2.205.000.000	79,5%	2.472.500.000	80%	2.695.500.000	80,5%	3.025.000.000	81%	3.640.000.000	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	78%	79%	2.205.000.000	79,5%	2.472.500.000	80%	2.695.500.000	80,5%	3.025.000.000	81%	3.640.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	6 dok	130.000.000	6 dok	150.000.000	6 dok	170.000.000	6 dok	180.000.000	6 dok	200.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	12 Dok	100.000.000	12 Dok	120.000.000	12 dok	150.000.000	12 Dok	275.000.000	12 Dok	275.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	100 org	100 org	500.000.000	100 org	520.000.000	100 org	600.000.000	100 org	620.000.000	100 org	650.000.000	

	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 org	50 org	75.000.000	50 org	82.500.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	115.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 lap	11 lap	150.000.000	11 lap	250.000.000	11 lap	275.500.000	11 lap	350.000.000	11 lap	400.000.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	10 dok	10 dok	1.250.000.000	10 dok	1.350.000.000	10 dok	1.400.000.000	10 dok	1.500.000.000	10 dok	2.000.000.000	

Berdasarkan tabel di atas, Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dialokasikan untuk membiayai Program/ Kegiatan untuk mendukung sasaran strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

3.4 Laporan Hasil Kegiatan Tahun Anggaran 2025-2029

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan pada Renstra Tahun 2025-2029, Indikator kinerja tersebut beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya sesuai tahun berjalan.

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik Renstra Tahun 2025-2029 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi.

Capaian Kinerja Program

Dalam mewujudkan pembangunan urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi didukung Anggaran pertahun dengan melaksanakan 6 (Enam) Program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 7 Kegiatan yang terdiri atas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Program ini memiliki 7 indikator kinerja pada setiap kegiatan yang indikatornya tercapai diantaranya, Terwujudnya Program Kegiatan dan Renja Badan Kesbangpol.

Permasalahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan program ini memerlukan Analisa terkait kebutuhan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memenuhi Operasional Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Badan Kesbangpol.

Upaya yang dilakukan.

Memverifikasi dan memenuhi kebutuhan dengan cermat supaya Anggaran dapat dipergunakan se-efisien mungkin sesuai kebutuhan dalam mendukung tupoksi.

Manfaat program

Meningkatnya pelayanan administrasi dan layanan public secara Optimal.

2. Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan

Program ini memiliki satu Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini memiliki satu indikator kinerja pada setiap kegiatan yang akan dicapai.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- a. Dalam proses pelaksanaan Program Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sub kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka masih adanya kabupaten/Kota pada proses rekrutmen paskibraka tingkat Provinsi dan Pusat mengirimkan peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi tidak sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Badan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022 dimana masih saja ditemukan calon peserta yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan juga bukan merupakan peringkat tertinggi yang lolos di kabupaten/kota.
- b. Kepengerusan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi Masih ada paguyuban/suku/ethis belum dapat tergabung kedalam kepengurusan yang dimuat

dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi dikarenakan keterbatasan Komunikasi antar Pengurus yang disebabkan banyaknya etnis dan kesibukan masing-masing anggota serta masih kurangnya legalitas etnis/suku/paguyuban yang menjadi wakil dalam kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi

- c. Kegiatan wawasan kebangsaan yang memiliki permasalahan terbatasnya anggaran pelaksanaan sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan yang diharapkan dapat menyentuh sampai lokasi yang dibutuhkan dalam target sosialisasi oleh pemerintah terkait dengan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.

Upaya yang dilakukan adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan rekrutmen sesuai dengan petunjuk teknis peraturan Badan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022 dan memberikan sosialisasi terhadap daerah mendorong untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada pada proses pengiriman calon peserta seleksi tingkat Provinsi sehingga tidak melemahkan kesempatan prestasi bagi yang memiliki penilaian tertinggi di daerah untuk dapat ikut seleksi tingkat pusat.
- b. Memanfaatkan anggaran yang tersedia semaksimal mungkin untuk dapat merangkul seluruh Suku/Etnis/Paguyuban dalam mewakili beberapa daerah sebagai perwakilan kepengurusan dalam Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi sehingga dapat menjadi fasilitasi suku/etnis/paguyuban dalam menerima aspirasi masyarakat serta dapat me-mediasi apabila ada gesekan sosial yang berasal suku/etnis/paguyuban
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada kabupaten/kota dilokasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan generasi muda yang berada yang berdomisili terdekat hingga yang jarak terjauh pada kabupaten/kota dengan membagikan kouta Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam Provinsi Jambi

Manfaat program ini adalah :

- a. Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagai cerminan capaian kinerja dalam memenuhi petugas pengibar Bendera Merah Putih pada hari kemerdekaan Republik Indonesia serta menciptakan generasi muda yang berkarakter Pancasila.
- b. Terciptanya kerukunan, kenyamanan dan ketertiban dalam Masyarakat suku/etnis/budaya serta tersampainya aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, dimana peran FPK sebagai mitra Pemerintah Daerah.

- c. Terbentuknya karakter masyarakat dan Generasi Muda yang berideologi Pancasila yang kuat yang diharapkan sebagai filterisasi terhadap paham-paham yang dapat menyesatkan masyarakat yang menjadi bibit perpecahan dan juga memantik kembali semangat Patriotisme dan Nasionalisme bagi masyarakat dalam pergaulan dan berbangsa serta mengingatkan kembali sejarah perjuangan merebut Kemerdekaan Negara Republik Indonesia

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini memiliki satu Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,

Permasalahan yang terjadi Program ini masih minimnya pendidikan politik kepada masyarakat serta rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada masih terkendala.

Upaya yang dilakukan Perlunya peningkatan pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dan perlunya dilakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilu dan Pilkada yg akan datang berupa kegiatan seperti sosialisasi, sarasehan, diskusi tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu dan Pilkada yang akan datang.

Manfaat Program Untuk Meningkatkan Informasi Politik, Alat Komunikasi Politik dan Pendidikan politik untuk masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah (Badan Kesbangpol) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih serta lembaga politik lainnya di daerah.

Hasil/Capaian

1. Terfasilitasi Program Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Politik
2. Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik untuk pemilih pemula.
3. Tersalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan Kursi Di DPRD.

4. Terlaksananya monitoring Situasi perkembangan politik di daerah.
5. Terjalannya sinergisitas dan koordinasi yang baik antara Lembaga Partai Politik dan Lembaga Lainnya di Daerah.

Kendala :

- a. Masih perlunya ditingkatkan fasilitas yang dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam melaksanakan tugas.
- c. Masih perlunya didorong anggaran terkait dalam mendorong pelaksanaan kegiatan di Bidang.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini memiliki 1 Kegiatan yang terdiri atas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan memiliki indikator kinerja pada setiap Kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini yaitu belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan banyak pihak-pihak yang terkait didalam tim terpadu pengawasan Ormas.

Upaya yang dilakukan lebih mengedepankan komunikasi melalui dialog dan pertemuan secara individu baik dadakan maupun berkala dalam mendukung pembinaan dan pengawasan ormas

Manfaat program dapat sebagai alat pembinaan dan pendekatan serta mentata kelembagaan Ormas di Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga terjaganya stabilitas yang aman dan kondusif serta dapat menciptakan ormas yang mandiri.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini memiliki 1 Kegiatan yang terdiri atas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program ini memiliki indikator kinerja pada setiap kegiatan yang indikatornya tercapai, yaitu terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi FKUB dan penghayatan kepercayaan.

Permasalahan yang terjadi.

- a. Dalam memfasilitasi belum didukungnya aturan yang dapat memfasilitasi FKUB dalam pelaksanaan Kegiatan sehingga terjadinya Stucknan dalam pelaksanaan kegiatan serta belum maksimalnya utusan perwakilan dari masing-masing Kerukunan Agama dan terjadi riak-riak kekecewaan.
- b. Untuk P4GN perlunya secara maksimal mendorong revisi peraturan daerah sebagai pedoman dalam memfasilitasi P4GN baik secara kelembagaan maupun stackholder dan masyarakat dalam mendorong Program/ Kegiatan P4GN.

Upaya yang dilakukan akan mengkomunikasikan aturan yang jelas kepada pihak terkait dalam memfasilitasi FKUB di daerah dan mendorong revisi segera Perda tentang P4GN sebagai dasar pelaksanaan Program/ Kegiatan di Daerah baik secara Lembaga maupun di masyarakat

Manfaat program sebagai alat dan bahan dalam memfasilitasi FKUB dan P4GN di Daerah.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini memiliki 1 Kegiatan yang terdiri atas Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur yang ada dikarenakan tingginya Konflik yang terjadi didaerah.
- b. Belum maksimalnya fasilitas yang dimiliki oleh Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- c. Perlu dukungan anggaran yang maksimal dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan serta Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Perlu penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi.
- b. Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi dan Kab/Kota Se-Provinsi Jambi dalam rangka Penanganan Permasalahan Konflik Sosial.
- c. Perlu penambahan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- d. Perlu dukungan anggaran pada Kegiatan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Manfaat program ini yaitu :

- a. Dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dengan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur yang ada pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi.
- b. Bisa Mengoptimalkan dengan Program yang ada dalam Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang telah dicanangkan dengan Mewujudkan Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah Swt, (JAMBI MANTAP).

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan, apabila terdapat kekurangan diharapkan untuk dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis”, dengan indikator Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Persentase Ormas aktif, Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi, realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dapat tercapai.
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti masih banyak aturan yang belum maksimal dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam penyelesaian dan pelaksanaan tugas pokok badan kesbangpol berdasarkan kewenangan dan pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan tujuan dalam memenuhi visi dan misi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

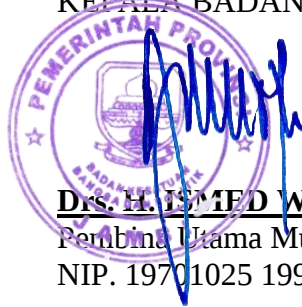
- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja dan monitoring serta evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang ada melalui berbagai program/ kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dapat tercapai.

- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya serta instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Meningkatkan peran aktif Khususnya Forkopimda melalui pertemuan rutin untuk mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban sesuai Kondisi yang terjadi.

Demikian Laporan kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2025, pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dipertahankan untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang.

Jambi, 30 Juli 2026

KEPALA BADAN,



Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701025 199003 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Admadibrata No. 4 Telp./ Fax (0741) 62486 - 62322
<http://www.kesbangpol.jambiprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 243 TAHUN 2025**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah selesainya dilakukan revidu oleh Bappeda dan Biro Organisasi Provinsi Jambi tanggal 2 September 2025 tentang kesesuaian IKU, Renstra dan Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 ;
- b. bahwa melaksanakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis lainnya, perlu melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah ;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jambi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu melakukan revisi menetapkan lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi ;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektotrat, Bappeda dan Lembaga Teknis lainnya ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran revisi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 11 September 2025

Pt. KEPALA BADAN,

Drs. AMIDY, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19741011 199303 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
NOMOR : 343 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2025

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tujuan : Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan Sasaran : Meningkatnya penegakkan demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Indeks Aspek Kebebasan Indeks Aspek Kesetaraan Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	$I(A_{j_politik}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{jk})$ dimana: $I(A_{j_politik})$: Indeks aspek ke-j P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k $I(X_{jk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI aspek ke-j, indikator ke-k	BPS Provinsi Jambi BPS Provinsi Jambi BPS Provinsi Jambi	Metode baru

PIN. KEPALA BADAN,

 Drs. AMIDY, M.Si
 Pembina TK I
 MP. 19741011 199303 1 001

